

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pariwisata

1. Pengertian pariwisata

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti, Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata “pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali - kali atau berputar - putar dari suatu tempat ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “Tour”.¹

Menurut pendapat dari James J. Spillane, mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.²

Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

¹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung: ANGKASA, 1991), hlm. 103.

² James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 20.

mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi.³

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penghasilan pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan sektor-sektor produktifitas lainnya, untuk itu pariwisata harus disimpulkan dari cara penggunaan istilah tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan tertentu dan bersifat sementara atau tidak untuk tinggal ditempat yang dikunjungi.⁴

2. Tujuan Pariwisata

Menentukan tujuan adalah langkah awal dari perencanaan agar ketika kegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang dalam melakukan perjalanan pasti memiliki tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tujuan pariwisata, antara lain :

- a) Keinginan bersantai
- b) Keinginan mencari suasana lain
- c) Memenuhi rasa ingin tahu

³ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010), hlm. 1.

⁴ Diana Setiati, *Dampak keberadaan Objek Wisata Lava Tour terhadap keadaan sosial Ekonomi Masyarakat Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman*, (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), hlm. 10.

- d) Keinginan berpetualang
- e) Keinginan mencari kepuasan

Sedangkan tujuan pengembangan pariwisata, sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 1990, yang menyebutkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata adalah:⁵

- a) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata.
- b) Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- c) Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- d) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- e) Mendorong pendayagunaan produk nasional.

3. Jenis Pariwisata

Kebanyakan batasan pariwisata telah merinci motif - motif yang mendorong seseorang untuk mengadakan perjalanan wisata. Terutama dalam international tourism, motif-motif tersebut sangat bervariasi dan mempunyai pengaruh yang menentukan pada daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Menurut James J. Spillane walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut :

⁵ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 15.

a) Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.

b) Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya, mereka tinggal selama mungkin di tempat-tempat yang dianggapnya benar-benar menjamin tujuan-tujuan rekreasi tersebut (misalnya di tepi pantai, di pegunungan, di pusat-pusat peristirahatan atau pusat-pusat kesehatan)

c) Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat

keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

d) Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori a) *Big Sports Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar. b) *Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri.

e) Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

f) Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis pariwisata ini makin lama makin penting. Perkembangan konvensi-konvensi dulu hanya dilakukan secara tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai tourist resorts atau daerah-daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk dijadikan tempat konferensi. Bahkan untuk tujuan tersebut telah ada beberapa negara seperti Belgia maupun Prancis yang membentuk asosiasi asosiasi sebagai sarana yang dianggap penting untuk mencapai tingkat pengisian kamar-kamar yang layak pada hotel-hotel mereka, terutama pada musim-musim menurunnya jumlah wisatawan yang masuk ke negara-negara tersebut.⁶

⁶ James J Spillane, *Ekonomi Pariwisata ...*, (yogyakarta, Kanisius 1987), hlm 29-31.

B. Pariwisata dalam pandangan islam

1. Gambaran umum pariwisata syariah

Pariwisata Syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.⁷

Pariwisata syariah merupakan perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan syariah.⁸

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang ditujukan kepada manusia untuk memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang yang ada disekitar kita dalam hal kebiasaan/adatnya untuk memperhatikan segala

⁷ Kemenpar. (2012, Desember 20). Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. Diakses tanggal 1 Oktober 2018, dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>

⁸ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 22.

sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu⁹.

Di mana Safar ditujukan untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk meningkatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.

Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.¹⁰

Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012), hlm. 398.

¹⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta:Republika, 2012), hlm. 33.

pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.¹¹

2. Karakteristik Pariwisata Syariah

Delapan faktor pengukuran wisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaanya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

- a Pelayanan kepada wistawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d Bangunan harus sesuai dengan prinsip Islam.
- e Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- g Ada tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- h Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

C. Wisatawan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan wisata. Mengenali tipologi wisatawan merupakan

¹¹ Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.21

hal penting dalam membuka paket wisata yang menjadi daya tarik suatu industri pariwisata. Klasifikasi wisatawan menurut Cohen sebagai berikut :¹²

- a. *Drifter*, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan bepergian dalam jumlah kecil.
- b. *Eksplorer*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri dan tidak mau mengikuti jalan - jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum (*Off the beaten track*). Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksi dengan masyarakat lokal juga tinggi.
- c. *Individual Mass Tourist*, yaitu wisatawan yang hanya menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.
- d. *Organized - Mass Tourist*, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya dan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata. Wisatawan seperti ini terkungkung oleh apa yang disebut sebagai *environmental bubble*.
- e. Wisatawan Mancanegara Definisi wisatawan ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi International Union of Office Travel Organization (IUOTO) dan World Tourism Organization (WTO). Wisatawan mancanegara adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke sebuah atau beberapa negara di luar tempat tinggal biasanya atau keluar dari lingkungan

¹² Muljadi A.J, *kepariwisataan dan perjalanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009), hlm. 25.

tempat tinggalnya untuk periode kurang dari 12 bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas wisata. Terminologi ini mencakup penumpang kapal pesiar (*cruise ship passenger*) yang datang dari negara lain dan kembali dengan catatan bermalam. Kondisi pariwisata alam yang sedang mengalami pertumbuhan memiliki beberapa keterbatasan dalam sarana dan prasarana, namun terdapat kelebihan dalam keaslian atau objek wisata yang alami. Hal ini berpeluang untuk menarik wisatawan bertipe petualang dan menyukai perjalanan ke tempat - tempat yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain.

D. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan suatu kawasan wisata merupakan hal yang penting dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana strategi pengelolaan suatu kawasan seharusnya ditentukan dengan matang sebelumnya sehingga tujuan dapat dicapai. Salah satu konsep pengelolaan pariwisata yang digalakkan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan sapta pesona pariwisata. Program Sapta Pesona yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1989 dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona sebagai payung tindakan Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.¹³ Selain itu dalam pembahasan

¹³ Murianto dan Lalu Masyhudi, *Pemahaman dan Penerapan Sapta Pesona Pada Pokdarwis di Wisata di Pantai Surga, Desa Ekas, Kabupaten Lombok Timur*. Media Bina Ilmiah. Vol. 11, No. 6, Juni 2017, hlm. 55.

pengelolaan pariwisata tidak akan lepas dari yang namanya komponen produk wisata yang meliputi daya tarik wisata, fasilitas dan pelayanan, kemudahan untuk mencapai destinasi wisata, dan keramahtamahan yang ditawarkan.

1. Sapta Pesona

Sapta Pesona, adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan. Penjelasan dari masing-masing unsur Sapta Pesona tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Aman

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Dengan menciptakan, mengkondisikan, memelihara dan masyarakatkan rasa aman maka akan terwujud rasa aman yang sesungguhnya dengan cara yang tidak melanggar aturan, norma, nilai, adat dan budaya kita sebagai bangsa yang besar dan beradab. Ada yang beberapa cara yang dapat menciptakan dan menjaga rasa aman. Diantaranya adalah:

1. Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjungannya.

¹⁴ Firmansyah Rahim, *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, (Jakarta : t.p., 2012), hlm.

2. Menolong dan melindungi wisatawan.
3. Menunjukkan rasa bersahabat terhadap wisatawan.
4. Memelihara keamanan lingkungan.
5. Membantu memberi informasi kepada wisatawan.
6. Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular.
7. Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.

b. Tertib

Suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Cara - cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan suasana tertib, antara lain:

1. Mewujudkan budaya antri.
2. Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku.
3. Disiplin waktu/tepat waktu.
4. Serba teratur, rapi dan lancar.

c. Bersih

Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

1. Tidak membuang sampah/limbah sembarangan.
 2. Menjaga kebersihan lingkungan objek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana pendukungnya.
 3. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara (akibat asap kendaraan, rokok atau bau lainnya).
 4. Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis.
 5. Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih.
 6. Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.
- d. Sejuk

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan “betah” bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

1. Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon.
2. Memelihara penghijauan di objek dan daya tarik wisata serta jalur wisata.
3. Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/ fasilitas umum, hotel, penginapan, restoran dan sarana prasarana dan komponen/fasilitas kepariwisataan lainnya.

e. Indah

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

1. Menjaga objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang estetik, alami dan harmoni.
2. Menjaga lingkungan dan tempat tinggal secara teratur dan serasi serta menjaga karakter kelokalan.
3. Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersifat alami.

f. Ramah

Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, perasaan diterima dan “betah” (seperti di rumah sendiri) bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

1. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela serta selalu siap membantu wisatawan.

2. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan.
3. Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan.
4. Menampilkan senyum yang tulus.

g. Kenangan

Suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

1. Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal.
2. Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat dan menarik.
3. Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/ khas serta mudah dibawa.

2. Komponen Produk Pariwisata¹⁵

a. Daya Tarik Wisata (*Attractions*)

Dalam kegiatan wisata, ada pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata, merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas senta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian, faktor daya

¹⁵ Sedarmayanti. Dkk, *Pengembangan dan pengembangan pariwisata*, (Jakarta : PT Refika Aditama, 2018), hlm.168 – 169.

tarik wisata merupakan salah satu unsur yang membentuk dan menentukan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata. Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Di bawah ini adalah jenis daya tarik wisata yang biasanya ditampilkan di destinasi pariwisata:

1. Daya tarik wisata alam (*natural tourist attractions*), segala bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam, misalnya: laut, pantai, gunung danau, lembah, air terjun, ngarai, sungai, hutan bukit
2. Daya tarik wisata buatan manusia (*man-made tourist attractions*), meliputi Daya tarik wisata budaya (*cultural tourist attractions*), misalnya tarian, wayang, upacara adat, lagu, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta, misalnya: bangunan seni, seni pahat, ukir, lukis.

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, hal demikian terlebih terjadi di destinasi pariwisata yang memiliki sangat beragam dan bervariasi daya tarik wisata, seperti yang ditulis oleh Robert Christie Mill dalam buku *Tourism The International Business* (1990): "Attractions draw people to a destination"

b. Fasilitas dan Pelayanan (*Amenities*)

Disamping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan

tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakan bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak berangkat dari tempat tinggal Wisatawan selama berada di destinasi pariwisata dan kembali ke tempat semula *Attractions bring people to the destination; facilities service them when they e there. Because they ara away from home, the visitor requires certain things-a place to stay something to eat and drink* (Robert Christie Mill, 1990: 24)

Fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan tersebut muncul dalam satu kesatuan yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain sehingga dalam suatu perjalanan wisata, seluruh komponen yang digunakan tidak dapat dipisahkan, tergantung pada karakteristik dan bentuk perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan.

Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan biasanya terdiri dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum dan fasilitas penunjang lainnya yang bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Komponen ini tidak terlepas dari adanya komponen prasarana atau infrastruktur, yaitu suatu komponen yang menjamin bagi tersedianya kelengkapan fasilitas. Fasilitas transportasi baru dapat disediakan apabila ada jaminan bahwa prasarana jalan sudah tersedia, demikian juga fasilitas telekomunikasi dapat disediakan apabila prasarana jaringan penghubung ke destinasi pariwisata tersebut sudah tersedia.

c. Kemudahan untuk Mencapai Destinasi/Daya Tarik (*Accessibilities*)

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara umum dapat mempengaruhi budget perjalanan tersebut.

d. Keramah tamahan yang ditawarkan (*Hospitality*)

Destinasi wisata dapat menyebabkan munculnya perasaan wisatawan terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan keramahtamahan melalui seseorang atau sesuatu, seperti yang ditulis oleh Robert Christie Mill: "The hospitality of an area is The general feeling of welcome that tourists receive while visiting the area People do not want to go where the do not feel welcome".

E. Usaha Pariwisata

Aktivitas pariwisata menggerakkan pelaku pariwisata di bidang ekonomi karena adanya *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) terhadap produk barang dan jasa. Wisatawan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, masyarakat yang berperan sebagai pelaku bisnis memasok produknya untuk menangkap apa yang dibutuhkan wisatawan. Peredaran uang, barang dan jasa sirkulasinya luas dan cepat sehingga ekonomi menjadi sangat berkembang.

Sehingga dengan adanya pengelolaan sektor pariwisata secara optimal maka akan memunculkan sentra bisnis pada obyek pariwisata. Sesuai dengan Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, sentra bisnis (usaha) dalam pariwisata digolongkan menjadi tiga, antara lain:¹⁶

1. Usaha (Bisnis) Jasa Pariwisata¹⁷

- a. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
- b. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- c. Jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
- d. Jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan Jasa pelayanan bagi satu pertemuan sekelompok orang, misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

¹⁶ Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 *Tentang Kepariwisataaan* Pasal 7

¹⁷ Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 *Tentang Kepariwisataaan* Pasal 9 ayat 1

- e. Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
 - f. Jasa konsultasi pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dan penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
 - g. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata¹⁸
- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
 - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
 - c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus.

¹⁸ Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 *Tentang Kepariwisataaan* Pasal 16 ayat 1

3. Usaha (Bisnis) Sarana Pariwisata¹⁹
- a. Penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
 - b. Penyediaan makanan dan minuman adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
 - c. Penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya angkutan umum yang wisata atau yaitu angkutan khusus menyediakan angkutan wisata.
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk, dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
 - e. Penyediaan kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

¹⁹ Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 *Tentang Kepariwisataaan* Pasal 23 ayat 1

F. Komponen Usaha Pariwisata Syariah

Komponen usaha, profesi, dan daya tarik wisata menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Daya Tarik/Objek Wisata Syariah

Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
- b. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci
- c. Tersedia makanan dan minuman halal
- d. Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah
- e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

2. Akomodasi Pariwisata Syariah

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
- b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah

²⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis ...* hlm. 57-58.

- c. Tersedia makanan dan minuman halal
 - d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
 - e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
3. Usaha penyedia makanan dan minuman

Seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku, dan proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, kafe, maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI
 - b. Ada jaminan halal dari MUI setempat, Tokoh muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya, apabila poin a belum terpenuhi
 - c. Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
4. Spa, sauna, dan massage

Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, di antaranya:

- a. Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk wanita
- b. Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi

- c. Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya
 - d. Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.
5. Biro perjalanan wisata syariah

Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualitas syariah. Namun yang penting biro perjalanan tersebut:

- a. Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah,
 - b. Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah,
 - c. Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
6. Pramuwisata (pemandu wisata) syariah

Pramuwisata syariah memegang peran sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karena ditangannyalah eksekusi berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam pariwisata syariah. Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata, keimanan seorang pramuwisata haruslah seorang muslim atau muslimah. Di samping itu ia harus memenuhi syarat berikut:

- a. Mendalami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
- b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab
- c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam

- d. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.

G. Peran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja disektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

Datangnya wisatawan di suatu daerah tujuan wisata yang tentunya dengan segala kebutuhannya dapat mendorong tumbuhnya berbagai usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Oleh karena itu di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, juga akan terdapat banyak peluang kerja, terutama untuk pekerjaan di berbagai usaha sektor pariwisata yang pada umumnya memerlukan banyak tenaga kerja. Pariwisata merupakan industri padat karya dengan kualifikasi yang beragam, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.

Tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dari berkembangnya pariwisata adalah sangat penting, sebab sektor ini selain memang memberi lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki lapangan kerja, juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang yang kekurangan jam kerja. Di samping itu banyak pekerjaan yang ditimbulkannya tidak memerlukan pendidikan atau ketrampilan yang tinggi. Misalnya kegiatan pariwisata yang terkait dengan sektor pertanian. Banyak ketrampilan operasional pada sektor ini yang relatif sederhana dan secara cepat dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat.²¹

Dengan adanya Objek wisata pada suatu daerah, juga mempengaruhi jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat. Spillane mengatakan lapangan kerja yang berkaitan dengan pariwisata dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pekerjaan langsung, pekerjaan tak langsung, dan pekerjaan yang berkaitan dengan investasi atau konstruksi infrastruktur.²²

Menurut Dwi Sadono dalam wardiyanto “perencanaan dan pengembangan pariwisata”, juga berpendapat bahwa peluang kerja dari pariwisata dibedakan menjadi 3 macam, yakni:

- a. Peluang kerja langsung yaitu, peluang kerja di dalam jenis-jenis usaha yang secara langsung menjual produk wisata yakni barang-barang dan jasa-jasa kepada Wisatawan, misalnya: hotel, restoran, transportasi, usaha-usaha hiburan dan toko- toko cinderamata.

²¹ Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hlm.10 – 11.

²² James J Spillane, *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, (yogyakarta, Kanisius 1994), hlm. 30.

- b. Peluang Kerja tidak langsung, yakni peluang kerja yang munculnya dipengaruhi oleh pengeluaran wisatawan di dalam kegiatan manufaktur dan distribusi dalam menjual barang-barang dan jasa-jasa untuk usaha pariwisata.
- c. Peluang kerja di sektor konstruksi dan industri barang-barang modal yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.²³

Selain itu pariwisata juga memerlukan tenaga kerja untuk keperluan pemberian jasa perorangan, seperti pramuwisata, instruktur, misalnya untuk main sky, pramuria di club malam, pelayan di bar, pengangkut barang, sopir dan sebagainya. Ini semua membuat tenaga kerja yang diperlukan di bidang pariwisata menurut perbandingan lebih banyak dari pada di usaha-usaha lain. Banyak tenaga kerja di bidang pariwisata itu memerlukan pendidikan dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan.

Ismayanti, juga mengungkapkan bahwa salah satu kontribusi pariwisata terhadap masyarakat yaitu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Adanya transaksi antar wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata dalam bentuk barang atau jasa menghasilkan suatu pendapatan bagi pemilik barang dan jasa.²⁴

Ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi dalam pertimbangan atau evaluasi potensi pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja bukan kategori homogen yang dapat diukur sebagai unit tersendiri. Ada bermacam-macam jenis pekerjaan dan mungkin tenaga kerja hanya secara parsial tergantung pada sektor pariwisata. Menurut beberapa kesan (stereo types),

²³ Wardiyanto, Baiquni, *Perencanaan dan ...*, hlm. 11.

²⁴ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), hlm. 189.

pekerjaan dalam sektor pariwisata cenderung menerima gaji yang rendah, menjadi pekerja musiman, tidak ada serikat buruh, hanya bekerja pada sebagian waktu (part time), dan khusus untuk anggota keluarga atau pekerja wanita. Akan tetapi, kesan ini hanyalah merupakan gambaran parsial. Kualitas pekerjaan dalam sektor pariwisata adalah faktor yang sangat penting. Pertimbangan ini dapat menghapus kesan yang palsu atau salah dan terlalu abstrak. Misalnya ada banyak pekerjaan yang diciptakan oleh permintaan akan barang manufaktur yang berkaitan dengan pariwisata.²⁵

Banyak pekerjaan dalam sektor pariwisata yang bersifat musiman. Akibatnya pekerjaan dapat berakibat negatif khususnya kalau pariwisata memusnahkan dasar kegiatan lain seperti kegiatan pertanian dalam syarakat desa. Jenis perekonomian lokal serta perkembangan pariwisata juga menentukan dampak pariwisata terhadap pasar regional untuk tenaga kerja. Kalau perkembangan cukup kecil, tenaga kerja dapat dicari dari pasar lokal. Kalau tidak, sistem migrasi tenaga kerja akan berkembang ke migrasi harian, musiman atau permanen. Walaupun permintaan akan jasa-jasa pariwisata cenderung naik, perubahan dalam produktivitas dapat mengurangi laju pertumbuhan pekerjaan.²⁶

Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila pemerintah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat secara keseluruhan atau pendapatan nasional.

²⁵ James J Spillane, *Pariwisata Indonesia ...*, hlm 58-59.

²⁶ Ibid, hlm.59.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mulai pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki, sumber daya diperlukan sebagai faktor produksi yang penting yaitu tenaga kerja/sumber daya manusia, sumber daya alam dan modal, karena menurut teori-teori ekonomi faktor-faktor produksi tersebut sangat ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lincoln arsyad berpendapat bahwa ada 4 (empat) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.²⁷

1. Entrepreneur

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

2. Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses

²⁷ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm.8-21.

pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (zoning) yang lebih baik. Peran fasilitator tidak saja hanya penyediaan atau perbaikan lingkungan, tetapi pemerintah daerah harus membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya juga mencegah kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

H. Perintah Bekerja dalam Islam.

Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan Firman Allah dalam QS An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ²⁸

Artinya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Perintah bekerja dalam Islam juga disebutkan dalam Firman Allah SWT

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2012), hlm. 278.

dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²⁹

Artinya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Selain setiap manusia diwajibkan untuk bekerja, islam juga mengatur bahwa manusia harus yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Menurut Hamzah Ya’kub, terdapat beberapa profesi / pekerjaan yang dihalalkan oleh islam dan dapat dipilih sesuai dengan kodrat dan bakti masing – masing. Antara lain :³⁰

- 1) Perdagangan (bisnis)
- 2) Transportasi (jasa)
- 3) Pertanian
- 4) Peternakan
- 5) Perikanan
- 6) Kemiliteran
- 7) Perburuhan dan Kepegawaian
- 8) Keguruan
- 9) Pertukangan
- 10) Pertenunan (kerajinan)
- 11) Seni (halus)

²⁹ Ibid, hlm.203.

³⁰ Hamzah Ya’kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 52.

- 12) Pertambangan
- 13) Kelautan
- 14) Eksplorasi mutiara

Sedangkan pekerjaan yang terlarang dalam Islam menurut Yusuf Qardhwi, ialah pekerjaan yang kotor. Kerja yang kotor adalah kerja yang mengandung unsur kezhaliman dan merampas hak orang lain tanpa prosedur yang benar. Seperti *ghashab*, mencuri, penipuan, mengurangi takaran dan timbangan, menimbun di saat orang membutuhkan dan lain sebagainya. Atau memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal, seperti riba, termasuk undian dan lain-lain. Atau harta yang dihasilkan dari barang yang haram, seperti khamr, babi, patung, berhala, bejana yang diharamkan, anjing yang terlarang dan yang lainnya. Atau harta yang diperoleh dari cara kerja yang tidak dibenarkan menurut syari'at, seperti upah para dukun dan takang ramal, administrasi riba, orang-orang yang bekerja di bar-bar, diskotik dan tempat-tempat permainan yang diharamkan dan lain-lain.³¹

Secara terinci sebagaimana dijelaskan Hamzah Ya'kub antara lain :³²

- 1) Pelacuran
- 2) Perjudian
- 3) Perdukunan
- 4) Riba

³¹ Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah, (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)*, Cetakan Pertama, (Solo: Citra Islami Press, 1997), hlm. 2.

³² Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja ...*, hlm. 53.

- 5) Jual beli barang haram
- 6) Memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi barang haram
- 7) Tukang tadah (dari hasil pencurian)
- 8) Ijon
- 9) Jual beli di masjid
- 10) Jual beli ketika azan Jum'at
- 11) Menimbun barang
- 12) Manipulasi ukuran/takaran
- 13) Menyembunyikan cacat barang yang akan dijual
- 14) Reklame palsu
- 15) Banyak sumpah untuk melariskan dagangan
- 16) Memonopoli pembelian barang untuk keuntungan pribadi

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti³³ dengan judul “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input Output)”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis input output, untuk mengkaji bagaimana pengaruh sektor pariwisata dan keterkaitannya dengan sektor lain terhadap perekonomian kota Bukittinggi. Selain itu secara spasial akan dilihat juga bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap pola dan struktur ruang kota Bukittinggi. Pengaruh sektor pariwisata terhadap

³³ Desi Arianti, *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input Output)*, Jurnal wilayah dan lingkungan Volume 2 nomor 3, Desember 2014, hlm. 183 – 196.

perekonomian kota Bukittinggi menunjukkan peran sektor pariwisata terhadap total permintaan adalah 40,86% apabila lapangan usaha di kelompokkan menjadi sektor pertanian & pertambangan, sektor industri, sektor pariwisata dan sektor jasa. Keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor lain dilihat dari indek daya penyebaran dan derajat kepekaan, semua sektor yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan mempunyai indek daya penyebaran > 1 . Tetapi indek derajat kepekaan > 1 hanya terjadi pada sektor perdagangan besar & eceran dan pengangkutan, sedangkan sektor hotel, restoran dan hiburan & rekreasi mempunyai indek < 1 . Multiplier effect semua sektor yang terkait kegiatan pariwisata mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap dampak pengganda baik output, pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja. Penerapan skenario input finansial, memperlihatkan pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Bukittinggi akan lebih besar apabila input finansial dialokasikan lebih besar terhadap sektor-sektor pariwisata, baik dalam bentuk pengeluaran belanja pemerintah maupun investasi. Keberadaan objek wisata di sekitar pusat kota telah mempengaruhi struktur kota, dimana kegiatan dan usaha yang terkait dengan pariwisata tertarik untuk berlokasi mendekati objek wisata. Namun pola perkembangan kota ke arah timur, utara dan selatan kota lebih dipengaruhi oleh keberadaan jaringan jalan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh sektor pariwisata perekonomian dan terhadap pola dan struktur ruang kota Bukittinggi serta metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan pendekatan positivistik, sedangkan penelitian yang saya tulis lebih fokus

membahas mengenai analisis pariwisata dalam meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan persamannya yaitu membahas mengenai pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryunda³⁴ dengan judul “Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu”. Dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum ekowisata yang terjadi di Kepulauan Seribu menyebabkan dampak ekonomi yang positif bagi pengembangannya. Pernyataan masyarakat mengindikasikan terjadinya peningkatan dari segi pendapatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekowisata di Kepulauan Seribu. Selain itu, kegiatan ekowisata menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat lokal maupun masyarakat di luar wilayah Kepulauan Seribu. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada penerimaan daerah, terutama dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perlu adanya pembenahan terhadap objek ekowisata dan pelatihan terhadap masyarakat lokal mengenai ekowisata yang berlangsung di daerahnya untuk meningkatkan minat dan daya tarik wisatawan untuk meningkatkan ekonomi lokal wilayah Kepulauan Seribu. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai dampak ekonomi dari pengembangan kawasan ekowisata kepulauan seribu, sedangkan penelitian yang saya tulis lebih fokus membahas mengenai analisis pariwisata dalam meningkatkan kesempatan

³⁴ Hanny Aryunda, *Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu*, Jurnal perencanaan wilayah dan kota, Volume 22 No. 1, April 2011, hlm 1- 16.

kerja masyarakat. Sedangkan persamannya yaitu membahas mengenai pengembangan disektor pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Octastefani dkk³⁵ dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata (studi pada Pantai Balekambang, Kabupaten Malang). Peneliti menggunakan perspektif New Public Management dalam menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, dengan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang telah menjalankan peranannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator dengan semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Meskipun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam memainkan peranan pemerintah daerah tersebut. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pembahasan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. sedangkan penelitian

³⁵ Theresia Octastefani dan Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, *Peran, Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 1, Maret 2015, hlm 1-116.

saya membahas tentang peningkatan kesempatan kerja masyarakat. Persamaannya yaitu membahas peran pemerintah melalui objek wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Meirina dkk³⁶ dengan judul “Penerapan Sapta Pesona Di Pantai Arta Indah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sapta pesona di Pantai Arta Indah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman yang meliputi 6 indikator yaitu: keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan sapta pesona di Objek Wisata Pantai Arta Indah yaitu: (1) Keamanan di Objek Wisata Pantai Arta Indah seperti: belum tersedianya petugas keamanan intern (SATPAM), penempatan petugas keamanan dilakukan secara tidak mencolok, fasilitas toilet umum dan sebagian tempat duduk gazebo tidak dapat digunakan dengan aman, belum tersedia life guard (petugas keselamatan), (2) Ketertiban di Objek Wisata Pantai Arta Indah seperti: tempat parkir tidak luas jika kendaraan wisatawan ramai dapat menyebabkan parkir tidak tertib, petugas dan pengelola belum memberikan informasi dan segala aturan bagi wisatawan, penempatan papan iklan luar ruangan belum tertata dengan rapi, (3) Kebersihan di Objek Wisata Pantai Arta Indah seperti: penampilan petugas dan pengelola yang bersih, kawasan objek wisata belum terjaga kebersihannya dengan baik, tidak tersedia tempat sampah, belum terjaganya kebersihan fasilitas toilet umum dan gazebo, (4) Keindahan di Objek Wisata Pantai Arta Indah seperti:

³⁶ Ira Meirina, Pasaribu, Dkk, *Penerapan Sapta Pesona Di Pantai Arta Indah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Sains Terapan Pariwisata Vol.2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 103-110.

pemandangan alam yang indah dan warung pedagang sudah tertata dengan baik, (5) Keramah-tamahan di Objek Wisata Pantai Arta Indah seperti: tidak semua petugas, pengelola, dan pedagang melayani wisatawan dengan ramah, (6) Kenangan di Objek Wisata Pantai Arta Indah seperti: adanya satu atraksi budaya khas Pariaman yaitu tari persembahan di tampilkan sekali dalam setahun (hari raya idul fitri), belum tersedianya toko souvenir, dan tempat khusus berfoto. Hal ini dapat dilihat bahwa penerapan sapta pesona di Pantai Pantai Arta Indah perlu ditingkatkan, dengan cara menciptakan kondisi atau suasana yang menunjang perwujudan sapta pesona seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keramah-tamahan, dan kenangan. Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas tentang implementasi sapta pesona pada wisata pantai arta indah, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada analisis pariwisata dalam meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Persamaannya sama sama membahas pengelolaan menggunakan sapta pesona pariwisata.

Penelitian yang dilakukan Ridwan dan Sri Rohkinasari³⁷ yang berjudul “Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon” Penelitian ini membahas dampak dari adanya pariwisata yang menguntungkan seperti terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, dan meningkatnya keramaian. Sedangkan dampak yang merugikan seperti mahalnya harga barang-barang, rusaknya daerah sekitar dan melunturnya kebudayaan. Dan memperoleh hasil bahwa adanya obyek wisata religi memiliki

³⁷ Ridwan Widagdo, Sri Rokhlinasari, *Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon*, Jurnal Al-Amwal, Volume 9, No. 1, Tahun 2017, hlm. 59 – 76.

pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan ekonomi atau penghasilan ini akan terasa cukup signifikan apabila ada moment-moment yang dilakukan oleh pihak pengelola pariwisata, dampak yang cukup signifikan lainnya bagi kehidupan masyarakat Cirebon adalah dapat terciptanya lapangan pekerjaan baru untuk warga di sekitar tempat wisata baik untuk keluarga maupun untuk orang lain. Perbedaan penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah membahas dampak ekonomi secara menyeluruh sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada analisis pariwisata dalam meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas usaha masyarakat di sektor pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilian Sarah Hiariey dan Wildoms Sahusilawane³⁸ dengan judul “Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon” Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi usaha yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa, (3) menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat yang menggunakan jasa objek wisata pantai Natsepa. Analisis data meliputi (1) analisis deskriptif, (2) analisis regresi ganda dengan spesifikasi-log menggunakan teknik Stepwise, dan (3) analisis indikator kesejahteraan SUSENAS-BPS. Hasil penelitian

³⁸ Lilian Sarah Hiariey dan Wodoms Sahusilawane, *Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Pantaru Natsepa, Pulau ambon*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 9, No. 1 Maret 2013, hal. 87-105.

menunjukkan bahwa bentuk-bentuk usaha di kawasan wisata Pantai Natsepa dengan distribusi terbanyak adalah usaha rujak sebesar 59,26%, diikuti dengan usaha jasa perahu (13,89%), usaha jasa pelampung (alat bantu renang) (11,11%), usaha jajanan makanan dan minuman (7,41%), usaha es kelapa muda (4,63%), dan usaha rumah makan (3,70%). Faktor yang mempengaruhi pendapatan kelompok rumah tangga yaitu, jumlah anggota keluarga, tingkat pengeluaran, dan curahan waktu kerja. Berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu persentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase sebesar 3%. Perbedaan yang dilakukan dengan peneliti yaitu metode penelitian yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pada penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa pariwisata yaitu jumlah anggota keluarga, tingkat pengeluaran dan curahan waktu. Untuk persamaannya yaitu dengan adanya obyek wisata masyarakat banyak yang membuka usaha pada sektor pariwisata.

Penelitian Fitri Andika³⁹ yang berjudul “Dampak pengembangan pariwisata terhadap kesempatan kerja dalam perspektif ekonomi islam (studi di pantai Labuan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat)” Penelitian ini membahas dampak pengembangan pantai labuan jukung yang dilakukan

³⁹ Fitri Andika, Skripsi “*Dampak pengembangan pariwisata terhadap kesempatan kerja dalam perspektif ekonomi islam (studi di pantai Labuan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat)*”, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 1-117.

pemerintah pada tahun 2014 terhadap kesempatan kerja masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komponen Pengembangan pariwisata terdiri dari atraksi wisata, promosi atau pemasaran, pasar wisata, transportasi serta fasilitas dan pelayanan wisata. Semua komponen tersebut berpengaruh terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Labuhan Jukung. Setelah Pantai Labuhan Jukung dikembangkan peluang/kesempatan kerja di Kawasan Pantai Labuhan Jukung meningkat sebanyak 30 unit usaha dengan peningkatan pekerja sebanyak 66 orang. Ini berarti dengan adanya pengembangan pariwisata di Pantai Labuhan Jukung menunjukkan dampak yang positif terhadap kesempatan kerja di Kawasan Pantai Labuhan Jukung. Peluang kesempatan kerja baru yang dibutuhkan pengunjung namun belum ada di Kawasan Pantai Labuhan Jukung adalah kios yang menjual cinderamata, spa, tempat bilas, toilet, dan rental motor atau sepeda. Pengembangan Pariwisata syariah terdiri dari empat aspek, yakni lokasi, transportasi, konsumsi, dan hotel. Namun pengembangan Pantai Labuhan Jukung belum memenuhi kriteria pengembangan pariwisata syariah, yaitu dari segi transportasinya. Akan tetapi baik pemerintah maupun masyarakat selalu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Sedangkan usaha-usaha masyarakat yang ada di Kawasan Pantai Labuhan Jukung telah memenuhi kriteria usaha pariwisata syariah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini membahas pengembangan destinasi wisata sedangkan yang dibahas peneliti tentang analisis pariwisata dalam peningkatan kesempatan kerja masyarakat yang juga membahas pengelolaan wisata pantai serang, persamaannya

adalah sama sama menganalisis pekerjaan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

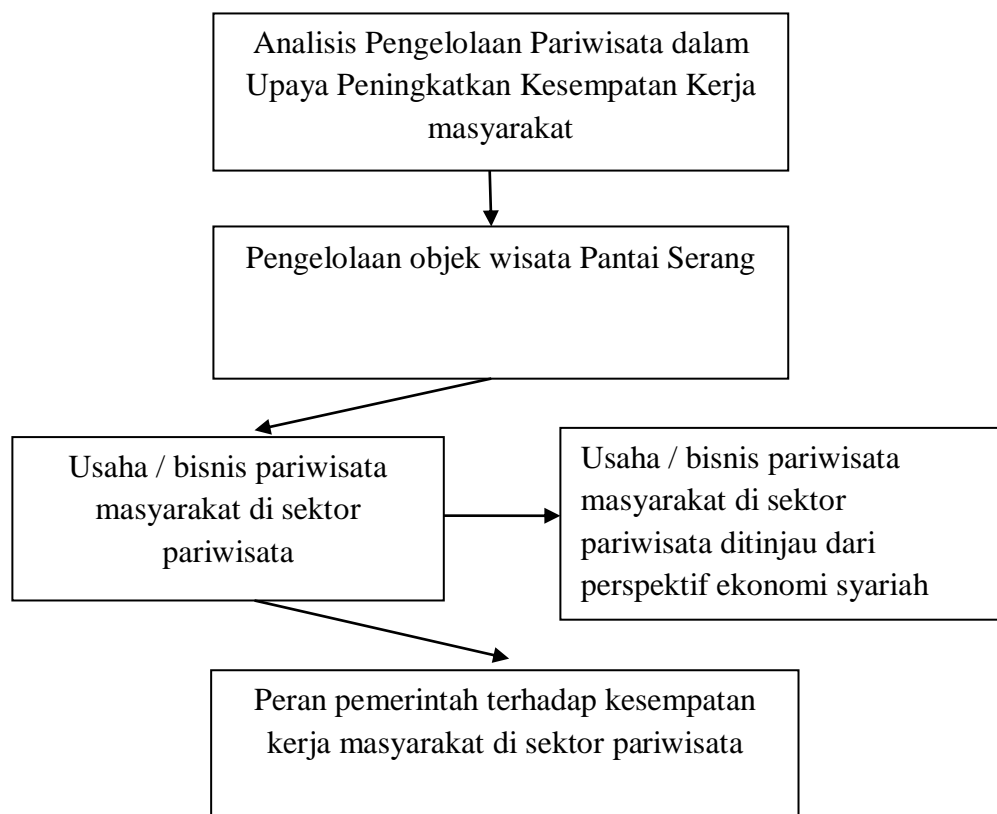
J. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan model konseptual variabel variabel penelitian tentang bagaimana pertautan teori teori yang berhubungan dengan variabel variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Penulis menuangkan pemikirannya dalam bentuk kerangka sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Pemikiran



Peran dari sektor pariwisata pada kesempatan kerja itu bisa dilihat dari strategi pengelolaan objek wisata sehingga dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar objek wisata dan dapat menyerap tenaga kerja di daerah kawasan objek wisata.

Hal ini tidak terlepas bahwa sektor pariwisata merupakan sektor multidimensi, dimana dengan adanya pendirian wisata pada suatu daerah akan melibatkan dan mempengaruhi beberapa aspek dalam masyarakat sekitar salah satunya aspek ekonomi yang nantinya juga berpengaruh kesempatan kerja masyarakat sekitar.